



PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI BUSKIPM

PEMBANGUNAN ZI BUSKIPM MENUJU WBK/WBBM

Disampaikan Oleh:
Meri Herawaty

Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

PERMEN KP NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KKP



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, perlu suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Benturan Kepentingan?

Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, **memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya** sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Benturan Kepentingan itu Seperti Apa?



Kesempatan penyalahgunaan jabatan



Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu



Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi



Penggunaan aset dan informasi jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan



Pelanggaran prosedur pengawasan karena pengaruh dari pihak yang diawasi



Perangkapan jabatan dalam berbagai hubungan untuk kepentingan jabatan lain



Tindakan Pegawai jika Berada dalam Situasi Benturan Kepentingan

Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi

Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan

Pengalihan tugas dan tanggung jawab

● Pengunduran diri dari jabatan

● Mutasi

● Membatasi akses informasi

Setiap pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
5. Situasi dimana pegawai KKP memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi dimana ada kesempatan penyalahgunaan jabatan;
8. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya (moonlighting atau outside employment);
9. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau
14. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Perangkapan jabatan
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
4. Gratifikasi
5. Kelemahan sistem organisasi

Pegawai Berpotensi Melakukan Benturan Kepentingan di BUSKIPM



TERDAPAT 18 JABATAN DI BUSKIPM YANG BERPOTENSI MELAKUKAN BENTURAN KEPENTINGAN



Pegawai Berpotensi Melakukan Benturan Kepentingan di BUSKIPM



TERDAPAT 18 JABATAN DI BUSKIPM YANG BERPOTENSI MELAKUKAN BENTURAN KEPENTINGAN



JIKA TERJADI/INDIKASI TINDAKAN BENTURAN KEPENTINGAN DI BUSKIPM, BAGAIMANA?



LAPOR KE :

01

Kepala Sub Bagian Umum

02

Sub Koordinator Pengujian

03

Sub Koordinator Bimtek

04

Meri Herawaty

LAPORKAN SEGERA

TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
2. Identifikasi situasi Benturan Kepentingan
3. Penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan
4. Penindakan apabila seorang penyelenggara negara dalam situasi Benturan Kepentingan

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin
2. Partisipasi dan keterlibatan para Pegawai
3. Perhatian khusus atas hal tertentu (hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), gratifikasi, kepentingan dalam pengadaan barang, perangkapan jabatan)
4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan (Contoh: aturan yang jelas dan prosedur yang efisien)
5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
6. Pemantauan dan evaluasi

TINDAKAN TERHADAP POTENSI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Pegawai KKP dilarang:

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
2. Menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
3. Menerima dan/atau memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai KKP;
5. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara;

TINDAKAN TERHADAP POTENSI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Pegawai KKP dilarang:

6. Bersikap diskriminatif atau tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
7. Memanfaatkan data dan informasi rahasia KKP untuk kepentingan pihak lain;
8. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pegawai KKP.

TATA CARA MENGATASI TERJADINYA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 13 Tahun 2016

1. Masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan atau tindakan
2. Laporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pengambil keputusan dengan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas dan melampirkan bukti-bukti terkait
3. Atasan langsung akan memeriksa kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan pegawai KKP yang dilaporkan tetap berlaku
5. Apabila hasil pemeriksaan itu benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monev Penanganan Benturan Kepentingan
di BUSKIPM dilakukan

Setiap



Triwulan





Terima Kasih

MATRIK IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
LINGKUP BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN



BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MATRIKS IDENTIFIKASI Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan

LINGKUP BUSKIPM

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
	Pejabat Lingkup BUSKIPM :	Gratifikasi, penggunaan aset, Rahasia Jabatan/instansi, Perangkapan Jabatan, rekrutmen pegawai, proses pengawasan, penyalahgunaan jabatan		
1	Kepala BUSKIPM	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam Penerbitan LHU mendapat gratifikasi dari pengguna jasa ▪ Dalam pengadaan barang dan jasa mendapat gratifikasi dari penyedia barang dan jasa ▪ Dalam penyaluran bantuan pemerintah mendapatkan gratifikasi dari calon penerima bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu ▪ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan vendor barang jasa atau penerima bantuan pemerintah ▪ Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi
		Penggunaan Aset	Penggunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi dan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Barang menetapkan penggunaan BMN melalui SK Kepala Balai ▪ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN ▪ Melakukan pengawasan internal ▪ Pengadaan BMN berdasarkan RKBMN

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran aktif petugas pengurus sekaligus penyimpan BMN ▪ Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan Rahasia negara (Promosi dan Mutasi Jabatan) untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Pengawasan Internal ▪ Menetapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala BUSKIPM ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan LHKPN tepat waktu ▪ Penerapan SPIP ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Rekrutmen Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung ▪ Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai ▪ Melakukan pungli dalam rekrutmen dan penempatan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen pegawai secara terbuka ▪ Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai ▪ Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan ▪ Menetapkan Pola Mutasi Pegawai dalam SK Kepala Balai
		Proses Pengawasan	Tidak melakukan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi SPIP ▪ Melakukan manajemen resiko ▪ Implementasi Reformasi Birokrasi
		Penyalahgunaan jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Internalisasi Kode Etik ▪ Pengawasan Internal

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Balai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Whistle Blowing System ▪ Melaksanakan pola mutase ▪ Melakukan Pola Mutasi Internal
2	Kepala Subbagian Umum	Gratifikasi	Dalam urusan ketatausahaan mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu ▪ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa ▪ Melakukan Pengendalian Gratifikasi
		penggunaan aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ peraturan yang berlaku ▪ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN ▪ Melakukan pengawasan internal ▪ Menyusun RKBMN berdasarkan analisa kebutuhan ▪ Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas pengurus sekaligus penyimpan BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Pengawasan Internal ▪ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ▪ Implementasi Whistle Blowing System
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN tepat waktu ▪ Menerapkan SPIP ▪ Implementasi Whistle Blowing System

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Rekrutmen pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutmen pegawai secara terbuka Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai
			<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan Implementasi mutasi pegawai sesuai Pola Mutasi Pegawai
		Proses Pengawasan	Tidak melakukan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi SPIP Melakukan manajemen resiko Implementasi Reformasi Birokrasi
		Penyalahgunaan jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada stakeholder terkait Pegawai memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Subbagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan komitmen Anti Korupsi Pengawasan Internal Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> Melakukan Pola Mutasi Internal
3	Subkoordinator Bimbingan Teknis dan Informasi	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penyusunan data dan kegiatan bantuan pemerintah mendapat gratifikasi dari calon penerima bantuan pemerintah Dalam mengadakan kegiatan Bimtek mendapat gratifikasi dari calon peserta Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan Pakta Integritas Melaporkan Gratifikasi Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa dan calon penerima bantuan pemerintah Melakukan Pengendalian Gratifikasi Penandatanganan komitmen Anti Korupsi
		Penggunaan aset	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan BMN sesuai ketentuan

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Pengawasan internal ▪ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisariss dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN tepat waktu ▪ Menerapkan SPIP
		Rekrutmen pegawai	Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen pegawai secara terbuka ▪ Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai ▪ Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan ▪ Implementasi mutasi pegawai sesuai Pola Mutasi Pegawai
		Proses Pengawasan	Tidak melakukan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi SPIP ▪ Melakukan manajemen resiko ▪ Implementasi Reformasi Birokrasi
		Penyalahgunaan jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa ▪ Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Internalisasi Kode Etik ▪ Pengawasan Internal ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
4	Subkoordinator Pengujian HPI, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam Penerbitan laporan hasil pengujian mendapat gratifikasi dari pengguna jasa ▪ Dalam penyaluran bantuan pemerintah mendapatkan gratifikasi dari calon penerima bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu ▪ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan calon penerima bantuan pemerintah ▪ Melakukan Pengendalian Gratifikasi ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Publikasi Tolak Gratifikasi
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ▪ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Rangkap jabatan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN tepat waktu ▪ Menerapkan SPIP ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Rekrutmen pegawai	Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen pegawai secara terbuka ▪ Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai ▪ Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi mutasi pegawai sesuai Pola Mutasi Pegawai
		Proses Pengawasan	Tidak ada pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi SPIP ▪ Melakukan manajemen resiko ▪ Implementasi Reformasi Birokrasi
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa dan penerima bantuan pemerintah ▪ Pegawai memiliki hubungan kekerabatan dengan Subkoordinator HPI, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Internalisasi Kode Etik ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ▪ Melakukan Pola Mutasi Internal
5	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima gratifikasi dari penyedia barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu ▪ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa/penerima bantuan Pemerintah ▪ Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua stakeholder ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Publikasi Tolak Gratifikasi ▪ Menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi ▪ Internalisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua pegawai ▪ Membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM •

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Barang menetapkan penggunaan BMN melalui SK Kepala Balai ■ Tertib administrasi pemakaian atau Peminjaman BMN ■ Melakukan pengawasan internal ■ Pengadaan BMN berdasarkan RKBMN Meningkatkan peran aktif petugas peningkatkan peran aktif petugas pengurus sekaligus penyimpan BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal Menetapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Rangkap jabatan KPA dan Kepala Balai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN tepat waktu ■ Penerapan SPIP ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Rekrutmen pegawai	Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rekrutmen pegawai secara terbuka ■ Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai ■ Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan ■ Menetapkan Pola Mutasi Pegawai dalam SK Kepala Balai
		Proses Pengawasan	Tidak ada pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi SPIP ■ Melakukan manajemen resiko ■ Implementasi Reformasi Birokrasi

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penyalahgunaan jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk membuat kebijakan dengan tujuan memperkaya diri	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
6	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Gratifikasi	Dalam penyusunan anggaran dan kegiatan mendapat gratifikasi dari calon penerima bantuan pemerintah dan penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa dan calon penerima bantuan pemerintah ■ Melakukan Pengendalian Gratifikasi ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Publikasi Tolak Gratifikasi
		Pengunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan ■ Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Informasi Publik Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN tepat waktu ■ Menerapkan SPIP

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi Whistle Blowing System
		Rekrutmen pegawai	Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rekrutmen pegawai secara terbuka ■ Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai ■ Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan ■ Menetapkan Pola Mutasi Pegawai dalam SK Kepala Balai
		Proses Pengawasan	Tidak ada pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi SPIP ■ Melakukan manajemen resiko ■ Implementasi Reformasi Birokrasi
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Pengawasan Internal ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
7	PPSPM	Gratifikasi	Dalam urusan ketatausahaan mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa ■ Melakukan Pengendalian Gratifikasi ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Publikasi Tolak Gratifikasi
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integrita ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan ■ Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Informasi Publik Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Rangkap jabatan sebagai PPSPM dan Kepala Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN tepat waktu ■ Menerapkan SPIP ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Rekrutmen Pegawai	Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rekrutmen pegawai secara terbuka ■ Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai ■ Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan ■ Implementasi mutasi pegawai sesuai Pola Mutasi Pegawai
		Proses Pengawasan	Tidak ada pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi SPIP ■ Melakukan manajemen resiko ■ Implementasi Reformasi Birokrasi
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada stakeholder terkait	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Pengawasan Internal ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
8	Bendahara Pengeluaran/Bendahara PNPB/	Gratifikasi	Dalam penatausahaan keuangan negara mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
	pengelola keuangan			<ul style="list-style-type: none"> ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk Kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi Whistle Blowing System
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Pengawasan Internal ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pimpinan
9	Pejabat Pengadaan	Gratifikasi	Dalam proses pengadaan barang/jasa mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa ■ Melakukan Proses Pengadaan sesuai ketentuan
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Pengawasan Internal ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
10	Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pengadaan	Gratifikasi	Dalam proses pemeriksaan atau penerimaan hasil pengadaan barang/jasa mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Menjabat sebagai salah satu direksi/komisaris pada perusahaan pengguna jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKPN tepat waktu ■ Menerapkan SPIP ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Proses Pengawasan	Tidak melakukan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi SPIP ■ Melakukan Manajemen Risiko

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementasi Reformasi Birokrasi ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Pengawasan Internal ■ Implementasi Whistle Blowing System
	Pelayanan BUSKIPM :	Gratifikasi, penggunaan aset, Rahasia Jabatan/instansi, Perangkapan Jabatan, proses pengawasan, penyalahgunaan jabatan		
11	Petugas Pelayanan	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pengguna jasa saat melakukan proses pelayanan penerimaan dan verifikasi sampel pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKSNI tepat waktu ■ Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi setiap kali melakukan pelayanan/verifikasi ■ Mengenakan seragam dan kartu identitas serta membawa surat tugas setiap kali melakukan verifikasi
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Merangkap jabatan sebagai pelaku usaha dibidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal
12	Analisis dan Penyelia Laboratorium	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pengguna jasa saat melakukan pengujian sampel dan hasil sampel pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan LHKS tepat waktu ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Merangkap jabatan sebagai pelaku usaha dibidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal
13	Penandatanganan LHU	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pengguna jasa saat menandatangani hasil pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Merangkap jabatan sebagai pelaku usaha dibidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal
14	Penyelenggara Profisiensi Uji	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pengguna jasa saat mengikuti kegiatan uji profisiensi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKS tepat waktu ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Perangkapan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal
15	Penyelenggara Bahan Acuan	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pengguna jasa saat mengikuti kegiatan uji profesiensi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKSAN tepat waktu ■ Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai
		Perangkapan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
	Kepegawaian BUSKIPM			
16	Koordinator fungsional	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pejabat fungsional saat melakukan kegiatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKSN tepat waktu
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Merangkap jabatan sebagai pelaku usaha dibidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal
17	Tim penilai fungsional	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pejabat fungsional saat melakukan penilaian kegiatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi ■ Melaporkan LHKSN tepat waktu
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ■ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Pengawasan Internal ■ Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Kepala Balai ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Merangkap jabatan sebagai pelaku usaha dibidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ▪ Internalisasi Kode Etik ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ▪ Melakukan Pola Mutasi Internal
18	Penanggung jawab Kepegawaian	Gratifikasi	Mendapat gratifikasi dari pegawai BUSKIPM saat melakukan kegiatan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Melaporkan Gratifikasi ▪ Melaporkan LHKSN
		Penggunaan Aset	Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan BMN sesuai ketentuan ▪ Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN
		Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandatanganan Pakta Integritas ▪ Pengawasan Internal ▪ Menerapkan kebijakan informasi publik melalui SK Kepala Balai ▪ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Perangkapan Jabatan	Merangkap jabatan sebagai pelaku usaha dibidang perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Melaporkan Gratifikasi

No.	Subjek	Bentuk Conflic Of Interest	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa ■ Sesama pegawai memiliki hubungan kekerabatan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penandatanganan Pakta Integritas ■ Penandatanganan komitmen Anti Korupsi ■ Internalisasi Kode Etik ■ Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> ■ Melakukan Pola Mutasi Internal

DOKUMENTASI INTERNALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BUSKIPM

